SKRIPSI

MODEL *PENTA HELIX* DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN BONE

RENDY SAPUTRA
E011211069

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2025

Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN

Model *Penta helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone

Rendy Saputra
E011211069

Skripsi,

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik pada tanggal 2 Januari 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Program Studi Administrasi Publik
Departemen Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan, Pembimbing Tugas Akhir,	Mengetahui, Ketua Program Studi Administrasi Publik,
Prof. Dr. Badu Ahmad, M. Si	Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP 196212311989031028	NIP 196310151989031006

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi berjudul "Model *Penta helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Prof. Dr. Badu Ahmad, M. Si). Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan manapun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari Karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Desember 2024
Yang menyatakan,

Rendy Saputra
E011211069

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, kekuatan ilmu, pengetahuan, taufiq, hidayah, petunjuk dan kemudahan sehingga penulis mampu menyelesaikan dengan baik tugas akhir ini. Selama kurang lebih tiga tahun empat bulan ini penulis diperkenankan untuk menjalankan studi keilmuan sesuai dengan kegemaran pribadi yang dikaruniai sejumlah individu dan/atau kelompok yang eksistensinya penting dalam ranah akademik, professional, maupun pengembangan kualitas pribadi penulis, dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya pada saat penulis lulus pada program studi ini di tahun 2024. Prof. Dr. Phil Sukri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh jajarannya pada saat penulis telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik FISIP Unhas, Prof. Dr. Alwi, M.Si, beserta seluruh jajarannya. Prof. Alwi merupakan sosok yang tegas, bijaksana dan rasional. Penulis berterima kasih atas ilmu yang diajarkan selama studi, sifat teladan rendah hatinya menjadi panutan, dan dukungannya atas seluruh pengembangan kapabilitas mahasiswa. Dosen Pembimbing Prof. Dr. Badu Ahmad, M. Si. Merupakan pengajar yang memiliki peran penting selama masa studi studi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. badu yang telah memberikan banyak masukan dan mengarahkan penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dosen sekligus Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Publik FISIP Unhas Dr. Muhammad Tang Abdullah, S.Sos, M.A.P. Merupakan Penguji I yang begitu berkesan dan menginspirasi penulis yang selalu memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan kepada penulis dalam mengikuti kegiatan baik di internal maupun eksternal kampus. Terimakasih kepada Dr. Hj. Syahribulan, M.Si merupakan Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dosen Dr. Muhammad Rusdi, M.Si. merupakan Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama masa studi ini, terima kasih banyak atas arahan dan dukungan selama penulis menjalankan masa studi ini. Terimkasih sudah menjadi teman diskusi yang menyenangkan dan membantu penulis untuk bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di tahun 2022.

Ucapan terima kasih kepada Dra. A. Ratnawati, M.Si selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang telah membantu serta mengarahkan penulis dan menjadi teman diskusi yang menyenangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ananda selaku ketua Forum Anak Kabupaten Bone, Ibu DR. Sarifa Suhra S.Ag M.Pd.i selaku Wakil Rektor III IAIN Bone dan Andi Imran selaku Pegawai RRI Bone yang telah menjadi teman diskusi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kasih kepada kedua orang tua saya, Bokap Mohammad Nurlaela merupakan dua sosok individu yang senantiasa n dan doa yang terbaik kepada anaknya. Apresiasi dan etinggi tingginya kepada keduanya karena setiap Langkah penulis tentunya tidak terlepas dari apa yang keduanya akasih kepada seluruh keluarga besar ST. Hapsah yang emangat kepada penulis, walaupun terkadang berisik se uarga but I love u guys! Sahabat saya selama perkuliahan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Abiel, Zikra, Alipta dan Asya. Terima kasih telah membersamai penulis selama tiga tahun empat bulan khususnya dalam proses perkuliahan. Bukan waktu yang singkat dan banyak hal yang sudan kita lakukan selama berada di kota makassar yang penuh gebrakan ini. Terus lakukan Gebrakan, Jangan Bosan, selagi itu bermanfaat dan tidak merugikan banyak Orang Fighting in your journey!

Keluarga Besar Kantor Staf Presiden Bapak Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P., M.A., Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI masa bakti 2019-2024 yang telah memberikan kesempatan besar bagi saya hingga bisa menjadi bagian dari perjalanan hebat di Keluarga KSP melalui Sekolah Staf Presiden. Keluarga Alumni Sekolah Staf Presiden 2023 Oji, Mas Akif, Amara, Kak Ifah, Kak Novy, Kak Nabilah, Sherly, Revan dan Cacul terima kasih sudah menjadi sahabat sekligus tempat belajar bagi saya. UNICEF tim Pak Hengky, Ibu Tria, Mas Wahyu, Mba Ayu, Kak Finda, Kak Vania, Kak Nuzul, Kak Priyo, Kak Bayu, Itin, Firman dan Pretty terima kasih atas ilmu dan dukungannya selama ini. Penulis belajar banyak hal selama 3 tahun lebih bersama UNICEF Indonesia. Semangat terus untuk kehidupan dan karirnya masing-masing.

Sahabat Saya dari Keluarga Forum Anak dan Forum GenRe Kabupaten Bone yang selalu memberikan dukungan Agung, Vio, Dila, Jia, Cica, Lisa dan Jery, Terima kasih atas dukungannya. Kalau mau liburan jangan suka dadakan. Sahabat saya faje, bintang, alip dan abdil terima kasih atas dukungannya. Sahabat Cileunyi Heppi, Alipuu dan Tika terima kasih dan Semangat terus dijalan kalian masing-masing. Kehadiran kalian dalam perjuangan penulis selama menyelesaikan masa studi ini sangat berarti. Dan Teman-teman dari Rumah Bone Ucu, Kiki, Gini, Adit, Alfian, Lemo, Arwan, Raply, dan Ahmad. Terima kasih atas dukungan dan kenangnnya selama ini.

Penulis,

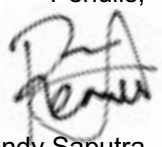

Rendy Saputra

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK

Rendy Saputra (E011211069). Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Model *Penta Helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone, xi+ 43 halaman 3 gambar + 5 Tabel + 21 daftar pustaka + lampiran. Dibimbing oleh Prof. Dr. Badu Ahmad, M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Kolaborasi melalui Model *Penta Helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen. Teknik analisis data yang dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Kolaborasi Model *Penta Helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone menurut Arief Yahya (2016) yaitu: Kolaborasi Pemerintah, Komunitas, Akademisi, Bisnis dan Media masih belum optimal karena dan keterlibatan satu sektor yaitu Bisnis masih belum terlibat dan masih terdapat beberapa kendala dalam proses kolaorasinya. Sektor Pemerintah dalam mewujudkan kabupaten layak anak telah membuat kebijakan terkait Kabupaten layak anak di Kabupaten Bone, melakukan proses monitoring dan evaluasi dengan tim gugus tugas Kaupaten Layak Anak, dan berkolaborasi dengan berbagai sektor baik dari sesama organisasi perangkat daerah, komunitas hingga media. Namun, sektor pemerintah masih sering terkendala dalam hal komunikasi kepada tim gugus tugas. selain itu, Akademisi selaku sektor pengembangan ilmu pengetahuan juga telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengabdian dan program terkait pemenuhan hak yang sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Namun, sektor akademisi masih terkendala dalam proses publikasi kegiatan. Komunitas sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam proses pendekatan masyarakat khususnya anak-anak juga telah melakukan program kerja yang sejalan dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Namun, Sektor Komunitas dalam menjalankan programnya masih terkendala dalam proses kolaborasi dengan beberapa pihak pemerintah. Selanjutnya sektor media, media telah berperan dalam menyebarkan informasi terkait isu dan hak anak melalui media
media juga masih memiliki kendala dalam hal kolaborasi
ektor media belum merasakan adanya inisiasi kolaborasi dari
un akademisi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di

si, *Penta Helix*, Layak Anak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRACT

Rendy Saputra (E011211069). Public Administration Department, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Penta Helix Model in Realizing Child-Friendly Districts in Bone Regency, xi + 43 pages 3 images + 5 Tables + 21 bibliography + appendices. Supervised by Prof. Dr. Badu Ahmad, M. Si

This study aims to explain Collaboration through the Penta Helix Model in Realizing Child-Friendly Districts in Bone Regency. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and document review. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation, and verification and confirmation of conclusions.

The results of the study indicate that the Implementation of the Penta Helix Collaboration Model in Realizing Child-Friendly Districts in Bone Regency according to Arief Yahya (2016) namely : Collaboration of Government, Community, Academics, Business and Media is still not optimal because the involvement of one sector, namely Business, has not been involved and there are still several obstacles in the collaboration process. The Government Sector in realizing a child-friendly district has made policies related to a child-friendly district in Bone Regency, carried out a monitoring and evaluation process with the Child-Friendly District task force team, and collaborated with various sectors both from fellow regional apparatus organizations, communities to the media. However, the government sector is still often constrained in terms of communication with the task force team. In addition, Academics as a sector for developing science have also carried out their duties and functions in carrying out community service and programs related to the fulfillment of rights in line with the Tridharma of Higher Education. However, the academic sector is still constrained in the process of publishing activities. The community as a sector that has an important role in the process of approaching the community, especially children, has also carried out work programs that are in line with realizing a child-friendly district. However, the Community Sector in carrying out its program is still constrained in the collaboration process with several government parties. Next, the media sector, the media has played a role in disseminating information
ıildren's rights through the mass media. However, the media
ıstacles in terms of collaboration with the government. The
felt any collaborative initiatives from the government or
a Child-Friendly Regency in Bone Regency.

tion, Penta Helix, Child-Friendly

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA ..... **iII**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Tinjauan Teori 6
I.2.1 Konsep Pemangku Kepentingan 6
I.2.2 Konsep *Collaborative Gevornance* 7
I.2.3 Latar Belakang Kemunculan *Collaborative Gevornance* *8*
I.2.4 Tujuan *Collaborative Gevornance* *9*
I.2.5 Proses *Collaborative Gevornance* Model *Penta helix* *9*
I.2.6 Kabupaten Layak Anak 12
I.2.7 Indikator Layak Anak 13
I.2.8 Kerangka Berpikir 15
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 16
I. 3.1 Tujuan Penelitian 16
II. 3.2 Manfaat Penelitian 16
BAB II METODE PENELITIAN **17**
II.1 Pendekatan 17
II.2 Desain Penelitian 17
II.3 Prosedur 17
II. 3.1 Penentuan Informan 17
II. 3.2 Teknik Pengumpulan Data 18
II. 3.3 Teknik Analisis Data 19
II. 3.4 Validitas dan Reliabilitas Data 20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **21**
III.1 Model *Penta Helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di
..... 21
ıtah 21
itas 23
nisi 25
..... 26
Swasta 28
..... **34**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

IV.1 Kesimpulan 34
IV.2 Saran 35
DAFTAR PUSTAKA 36

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak 3
Gambar I.2 Aktor Model Penta Helix 11
Gambar I.3 Kerangka Berpikir 15

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Bone 2
Tabel I.2 Kritetria Pemeringkatan Penghargaan Kabupaten Layak Anak 4
Tabel I.3 Pringkat Penghargaan KLA Kabupaten Bone 4
Tabel I.4 Daftar Informan Penelitian 18
Tabel I.5 Peran Aktor dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone 28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Penulis 39
Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian dari FISIP Universitas Hasanuddin 40
Lampiran 3 Surat Permohonan Izin Melakukan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Selatan 41
Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Penelitian 42
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone.....43
Lampiran 6 Logbook Penelitian 44
Lampiran 7 Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bone.....46

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan seberapa berkualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Salah satu sumber daya manusia yang memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu anak (Hestiani, 2020). Data Hasil proyeksi penduduk interim Tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 79.489.510 jiwa penduduk Indonesia adalah anak, yaitu penduduk yang berumur 0-17 Tahun (BPS, 2022). Oleh karena itu, sudah menjadi hal yang begitu krusial untuk berkomitmen Bersama dalam memenuhi hak-hak anak sebagai bentuk kepedulian Bersama dengan mewujudkan dunia yang layak bagi anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak (Kemen PPPA). Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan program yang dicanangkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006.

Adapun hal yang melatar belakangi terciptanya kebijakan ini karena pada tanggal 20 September 1989 terbentuk sebuah kesepakatan yang benama Konvensi Hak Anak (KHA) tingkat internasional. Konvensi tersebut disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak yang berisi tentang penjaminan, pengakuan dan proteksi serta pemenuhan hak anak yang terbagi dalam empat golongan, yakni hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi. Hal tersebut kemudian diperkuat dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 21, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Selain itu, pada tanggal 10 Mei 2002 Indonesia telah ikut menandatangani *World Fit for Children Declaration* (WFC) atau yang bisa kita sebut sebagai deklarasi dunia layak anak pada sidang PBB ke 27 yang membahas khusus tentang anak (Patilima, 2017). Namun, walaupun sudah didasari dengan dasar hukum yang jelas, kekerasan terhadap anak masih terjadi di Indonesia. Berikut datanya :

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Tabel I.1 Jumlah Kasus Kerasan Terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	14.446 kasus
2.	2022	16.106 kasus
3.	2023	18.175 Kasus

Olahan Peneliti
Sumber : (SIMFONI PPA, 2024)

Dari tabel diatas kita bisa melihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Hal ini, semakin memperkuat bahwa permasalahan terkait kekerasan anak merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk diselesaikan dan program Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan salah satu cara untuk bisa keluar dari permasalahan pemenuhan hak anak. Secara umum Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak sedangkan tujuan secara khusus, KLA diciptakan untuk membangun inisiatif di kalangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota yang mengacu pada upaya implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) (Rosalind, dkk., 2014)

Bagi Sebagian orang jika mendengar Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang akan terlintas dibenak fikirannya adalah Kabupaten/Kota yang sudah terbebas dari masalah terkait anak seperti anak jalanan atau anak terlantar. Namun, jika ditilik lebih dalam Kabupaten/Kota Layak Anak tidak hanya berfokus pada dua hal tersebut karena dalam konteksnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) akan membahas banyak hal terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak spesifiknya menjelaskan bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat dilihat melalui 24 Indikator yang telah dikelompokkan ke dalam 1 (satu) kluster Kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak-hak anak yang harus terpenuhi dari setiap Kabupaten/Kota, sebagaimana berikut ini :

Gambar I.1 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Sumber : (KEMENKKO PMK, 2024)

Dari Penjelasan diatas, kita bisa melihat bahwa untuk mendapatkan kategori Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), suatu Kabupaten/Kota perlu melakukan kolaborasi yang maksimal. Sebagai bentuk pengembangannya maka dibentuk tim khusus yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang disebut Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Gugus tugas tersebut terdiri dari beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membidangi pemenuhan hak anak serta perlindungan anak, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan media yang saling bekerjasama. Fungsi gugus tugas Kota Layak Anak memiliki peran yang sangat utuh dan cakupan yang sangat besar dalam mendukung dan mengkoordinasi seluruh personil yang terkait data mengenai anak dan kegiatan dukungan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (Patilima, 2017).

Saat ini, salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) terdapat pada hubungan antar personil dalam gugus tugas yang belum maksimal, serta kurangnya kolaborasi dari berbagai pihak. Permasalahan yang membuat jalannya koordinasi terhambat, adanya unsur emberian informasi dan dukungan mengenai kebijakan Anak (KLA) yang sering dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan *overnance* yang baik serta melibatkan berbagai sektor baik un non pemerintah yang tergabung dalam gugus tugas Anak (KLA).

ve governance merupakan salah satu konsep pemerintahan nnya itu dilakukan secara kolaboratif. Ansell & Gash (2008)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* menjadi sebuah seni manajemen baru pada tata Kelola pemerintahan yang membentuk majemuk pemangku kepentingan dan bekerjasama dalam forum yang sama untuk mencapai visi yang diinginkan. *Collaborative governance* yang baik merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kabupaten/kota layak anak. Kabupaten Bone sendiri meskipun dalam perjalanannya mencapai Kabupaten Layak Anak terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi Kabupaten Bone belum dapat dikatakan sebagai Kabupaten Layak Anak yang terbebas dari segala bentuk permasalahan anak.

Selanjutnya, Untuk mendapatkan predikat Kabupaten/Kota Layak Anak ada beberapa kriteria pemeringkatan penghargaan yang terdiri dari tingkatan Pratama dengan bobot nilai (500- 600), Madya (600-700), Nindya (700-800), Utama (800-900, dan KLA (900-1000) hal ini telah ditentukan dalam petunjuk teknis pengisian evaluasi penyelengaraan KLA (Kemen PPA, 2022).

Tabel I.2 Kriteria Pemeringkatan Penghargaan KLA

No.	Tingkatan	Bobot Capaian
1.	Pratama	500-600
2.	Madya	600-700
3.	Nindya	700-800
4.	Utama	800-900
5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	900-1000

(Olahan Peneliti, 2024)
Sumber : (Kemen PPA, 2022)

Tabel I.3 Peringkat Kriteria Penghargaan KLA Kabupaten Bone

No.	Tahun	Peringkat Penghargaan
1.	2017	Pratama
2.	2018	Pratama
3.	2019	Madya
4.	2020	*Non* Penghargaan KLA
5.	2021	Nindya
6.	2022	Nindya
7.	2023	Nindya

(Olahan Peneliti, 2024)

Jika melihat tabel diatas disetiap tahunnya Kabupaten Bone terus mengalami dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini Kabupaten ada kategori Nindya sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA). gai bukti bahwa Kabupaten Bone masih belum benar-benar alahan anak, karena masih ada saja indikator yang belum an tersebut banyak disebabkan karena belum adanya antar gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) serta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kesadaran dari setiap aktor yang kerap kali merasa bahwa permasalahan anak bukan permasalahan yang penting untuk diselesaikan secara bersama.

Pada kluster Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif masih banyaknya masalah terkait perkawinan usia anak. Pada tahun 2019 jumlah kasus perkawinan usia anak di Kabupaten Bone mencapai 764 Kasus lalu ditahun 2021 menjadi 85 kasus. Dan dispensasi perkawinan usia anak tahun 2019 mencapai 419 kasus, Sedangkan pada tahun 2021 menjadi 63 kasus (Kemenag, Bone). Kasus ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak sebagai aset bangsa.

Pada kluster Kesehatan dasar dan kesejahtraan juga masih terdapat masalah seperti pada indikator prevalansi Gizi terkait masalah stunting di kabupaten bone. *Global Nutrition Report 2016* mencatat bahwa prevalensi stunting yang ada di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO) Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta anak balita di dunia mengalami stunting. Masih menurut data yang sama, *World Health Organization* (WHO) mengungkapkan pada tahun 2019 penurunan stunting hanya 0,9% saja yaitu menjadi 21,3% atau sekitar 144 juta balita masih mengalami stunting. Sedangakan Kabupaten Bone menempati urutan ke-4 (empat) sebagai kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi dari 24 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan prevalensi stunting sebesar 40,1% pada tahun 2018, tahun 2019 37,0%, dan tahun 2020 setinggi 33,0% (laman resmi bone: bone.go.id).

Pada kluster Pendidikan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alerntif yang merupakan salah satu permasalahan yang cukup besar terkait anak tidak sekolah di kabupaten Bone. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2022 total jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Bone mencapai 17.778 Anak. Dengan jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 7.001, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.469 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) 1.649. dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kabupaten Bone masih memiliki masalah yang serius dalam kluster ini, karena sejatinya anak berhak untuk mendapatkan hak dasarnya untuk mendapatkan Pendidikan yang layak.

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Bone. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah apakah anak menjadi prioritas dalam pembangunan disetiap daerah kabupaten/kota. Jika menilik lebih dalam, selama ini pemerintah daerah hanya sibuk memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, ekonomi dan politik tanpa melirik kepentingan terbaik dalam anak. Permasalahan anak seolah dikesampingkan serta tidak menjadi sebuah prioritas bersama. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam

n pemenuhan indikator Kabupaten Layak Anak di Kabupaten

2008) mengistilahkan *collaborative governance* merupakan nerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku merintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan oses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk sanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Makna dari *collaborative governance* dapat menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan antar lintas sektor melalui gugus tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bone.

Penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang sejenis yaitu mambahas terkait *collaborative governance. collaborative governance* merupakan sebuah pola Kerjasama yang sudah banyak dilakukan oleh berbagai kelangan. Penelitian sebelumnya di Indonesia banyak menunjukkan bahwa *collaborative governance* digunakan sebagai bagian dari proses pengembangan baik untuk mengembangkan kawasan ekonomi khusus (Trisna dkk., 2022), maupun pengembangan desa wisata (Mafaza dan Setyowati, 2020).

Konsep *collaborative governance* juga digunakan untuk proses penanggulangan bencana alam di daera seperti banjir (Sihaloho, 2022). Sementara itu penulis seperti (Fajrianti dkk., 2022) dan (Alpin dkk., 2022) melihat bahwa konsep *collaborative governance* dapat mewujudkan penguatan perlindungan bagi anak melalui Kerjasama lintas sektor dengan rekomendasinya di daerah Batam dan Bandung. Berbeda dengan peneliti sebelumnya, pada penelitian ini konsep *collaborative governance* melalui Model *Penta Helix* digunakan untuk melihat apakah proses dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone yang spesifiknya dilihat dari Kerjasama antar sektor yang tergabung dari berbagai pemangku kepentingan berhasil atau tidak dilakukan. Selanjutnya, pada penelitian sebelumya spesifik penerapan model *Penta Helix* di gunakan dalam penanggulangan bencana alam, berbeda dengan peneliti kali ini yang secara spesifik melihat penerapan model *Penta Helix* pada fenomena permasalahan sosial.

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa secara empiris konsep *Penta helix* merupakan konsep yang komprehensif dalam pemetaan pemangku kepentingan. Penelitian Sturesson, Lindmark dan Roos berkesimpulan bahwa model *Penta helix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan pada satu lokasi atau satu kasus (Sturesson et al., 2009). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhyi, Chan, Sukoco, dan Herawaty, menunjukkan bahwa konsep *Penta helix* dapat membantu menganalisis dan memetakan "permasalahan hubungan" antara pemangku kepentingan (Muhyi et al., 2017). Sedangkan penelitian Halibas, Sibayan, dan Maata menjelaskan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan *Penta helix* dapat menunjukkan pemangku kepentingan yang mampu mendorong dan membuat inovasi (Halibas et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Model *Penta Helix* dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

gku Kepentingan

olmén berpendapat bahwa konsep maupun pengertian
akan sangat tergantung pada kepentingan akademis atau
mengkajinya (Billgren dan Holme, 2008). Freeman (1984)
emangku kepentingan yakni suatu kelompok masyarakat

ataupun individu yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari organisasi. Sedangkan menurut Azheri berpandangan bahwa pemangku kepentingan sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada suatu permasalahan (Azheri, 2012).

Contoh lainnya, Pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memengaruhi kinerja serta pencapaian tujuan organisasi atau proyek (Rowlinson dan Cheung, 2008). Sedangkan Derek Walker, Arthur Shelley and Lynda Bourne (2008) mendefinisikan pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan, hak atau kepemilikan dalam proyek dan dapat berkontribusi, dipengaruhi oleh proyek, baik pekerjaan atau hasil proyek.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap permasalahan atau proyek yang akan diselesaikan. Bila dikaitkan dengan penelitian ini tentang pengelolaan bencana banjir paparan Danau Tempe, maka dapat dikatakan bahwa pemangku kepentingan yang akan di teliti adalah individu atau kelompok/ lembaga yang terlibat dalam pengelolaan bencana banjir, individu atau kelompok/ lembaga tersebut terdampak langsung maupun tidak terhadap banjir.

I.2.2 Konsep *Collaborative Gevornance*

Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintah baru telah muncul untuk menggantikan metode administrasi dalam pembuatan dan implementasi Kebijakan. *Collaborative governance* menjadi isu yang teoritis dan praktis yang muncul dalam administrasi publik karena semakin banyak diadopsi di tingkat lokal. *Collaborative governance* dimaksud untuk membuat administrasi publik lebih efisien. Reformasi *new public management* berusaha untuk menyesuaikan mekanisme birokrasi Weberian yang didasarkan pada aturan yang jelas, struktur hierarki, pembagian tanggung jawab fungsional, dan spesialisasi dengan kebutuhan akhir abad kedua puluh dengan mengadopsi teknik manajemen dari sektor bisnis. (Cohen 2016; Dunleavy et al.2006; Pollitt dan Bouckaert 2011; Stoker 2006; Vigoda-Gadot 2009).

Konsep *Collaborative governance* merupakan sebuah pola pengembangan Kerjasama organisasi publik di negara, yang tertuang dalam kelompok di mana kelompok tersebut akan ikut serta dalam tahapan perumusan, pembuatan kesepakatan serta praktik hasil dari peraturan yang telah disepakati. *collaborative governance* merupakan sebuah tahapan Kerjasama dimana beberapa lembaga publik dan para pemangku kepentingan akan terlibat dalam mengendalikan keputusan dari sebuah proses pembuatan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, yang merujuk pada adanya komunikasi serta Tindakan Bersama dari para pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008)

anya pemangku kepentingan tersebut akan duduk Bersama
ah keputusan publik yang merupakan hasil dari Konsensus
dialog secara tatap muka. Selanjutnya, pemahaman terkait
sebuah realitas dalam sebuah Kerjasama dimana para aktor
rbagai misi dan memiliki arah pergerakan demi mencapai
hendak didapat melalui proses Kerjasama, menghormati
udah disepakati, saling menghrgai serta membangun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepercayaan antar aktor yang terlibat dengan berbagai keterampilan dan kemampuan dari masing-masing instansi selama menjalankan Kerjasama (Ansell & Gash, 2008).

Dalam buku Colla*borative Governance New Era of Public Policy in Australia* oleh Janine O'Flynn dan John Wanna tahun 2008 dijelaskan bahwa kolaborasi bisa dilakukan pada organisasi pemerintah untuk memecahkan permasalahan yang kompleks serta untuk mencapai tujuan secara efektif dan tepat sasaran. Dalam sistem pembelajaran dan pendidikan di Australia sudah menerapkan berbagai model kolaborasi. Di *Queensland, The Queensland Departement of Education, Training, and the Arts* (DETA) melakukan kolaborasi dengan tiga sektor sekolah yaitu negara, katolik, dan pihak independent. Kolaborasi yang dilakukan itu untuk mencapai goal atau hasil yang ingin dicapai, hasil yang ingin DETA capai adalah untuk mecerdaskan, skill yang mumpuni, dan kreatif khususnya di Queensland (O'Flynn & Wanna, 2008).

Collaborative governance sebagai proses kolektif dan tidak adanya perbedaan pada setiap partisipan, didalamnya memiliki otoritas substansi dalam mengambil keputusan dan setiap pemangku kepentingan juga memiliki kesempatan yang sama untuk manyampaikan aspirasinya dalam proses tersebut tanpa adanya diskriminasi dan sesuai pada proporsinya. Berdasarkan tata Kelola pemerintahan yang kolaboratif, Kerjasama dalam bentuk ini akan terjadi pengampaian visi, tujuan, strategi dan aktivitas antar pihak. Namun, masing-masing pihak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka harus tunduk atas kesepakatan Bersama (Ratner, 2012).

Dari penjelasan diatas, kolaborasi dapat diaplikasikan pada sektor publik. Keterbatasan yang dimiliki pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu hasil yang baik perlu melibatkan berbagai pihak agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Disadari bahwa kolaborasi itu muncul karena adanya sifat saling membutuhkan antar organisasi dalam mengurusi suatu permasalahan. Kolaborasi ada di dalam organisasi juga ada diantara dan disekitaran mereka yang melakukan Kerjasama. Mereka menyediakan orang untuk bekerja bersama untuk merencanakan, memecahkan masalah dan membuat keputusan sebelum mengambil tindakan (Strauss, 2022).

I.2.3 Latar Belakang Kemunculan *Collaborative Gevornance*

Menurut Ansell & Gash (2008) *Collaborative Governance* merupakan strategi baru yang muncul dalam dunia perkembangan paradigma *governance*. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi kemunculan sistem *collaborative governance.*

ah kegagalan implementasi kebijakan atau tata kelola di ketidakmampuan kelompok-kelompok kepentingan karena kekuasaan yang ingin menggunakan sementara institusi lain buah keputusan. Terdapat mobilisasi kelompok kepentingan yang mahal membuat terciptanya politisasi aturan (Ansell &

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Perkembangan konsep *collaborative governance* juga di sebabkan oleh pemikiran masyarakat yang semakin berkembang dan berjiwa kritis melalui tuntutannya atas berbagai macam masalah sementara kapasitas pemerintah yang terbatas dalam menyelesaikan masalah. Meningkatnya sebuah pengetahuan serta infrastruktur yang berkembang secara lebih kompleks dan saling membutuhkan juga menjadi sebuah faktor pendorong adanya sistem *collaborative governance* (Astuti dkk., 2020).

Ansell & Gash (2008) juga mengungkapkan kriteria yang harus ada dalam konsep *collaborative governance* yang setidaknya terdapat enam kriteria yaitu: suatu forum di prakarsai oleh institut publik, partisipasi forum harus mencakup aktor non negara, partisipan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya dimintai pendapat oleh badan publik, forum diselenggarakan secara formal dan bertemu secara kolektif, tujuan forum adalah untuk membuat keputusan berdasarkan dengan Konsensus (kesepakatan bersama) dan kolaborasi harus berfokus pada kebijakan publik.

I.2.4 Tujuan *Collaborative Gevornance*

Awal mula munculnya *collaborative governance* dikarenakan adanya keterbatasan serta kemampuan dari tiap-tiap lembaga ketika hendak menjalankan programnya. Minimnya keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu penyebab timbulnya kerjasama antar berbagai sektor yang menimbulkan suatu proses kolaborasi. Pada tata kelola pemerintahan sistem kerjasama dapat dijadikan suatu acuan pada pengembangan ilmu pemerintahan di karenakan di dalamnya memiliki sebuah fokus pada partisipasi multi aktor seperti aparatur negara, publik dan pihak swasta. Alternatif dari kerjasama ini ialah memiliki tujuan pengembangan keterlibatan pihak-pihak kepentingan baik itu dalam suatu organisasi pemerintahan atau organisasi non kepemerintahan (Astuti dkk., 2020).

Dalam buku Colla*borative Governance New Era of Public Policy in Australia* oleh Janine O'Flynn dan John Wanna tahun 2008 Peningkatan kolaborasi antar organisasi diperlukan untuk menghadapi realitas kompleks masyarakat saat ini (Christensen & laegreid, 2011). Dengan demikian, kolaborasi tidak hanya diperlukan untuk meningkatkan pelayanan publik semata, tetapi untuk menciptakan kemampuan memecahkan masalah kontemporer dalam penyediaan layanan sektor publik (Keast & Brown 2002). Suatu kelompok kerja akan mencapai kriteria dan produktivitas yang diinginkan apabila dilakukan melalui sistem manajemen atau pertemuan yang baik, adanya peranan dan rasa tanggung jawab yang jelas serta mampu melaksanakan manajemen konflik, memiliki prosedur dan operasi yang jelas namun sederhana serta sehingga tujuan pencapaian misi tim akan diraih (Billa dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

rative Gevornance* Model *Penta helix

ini peneliti memilih teori *Collaborative Gevornance* Model
ihat komponen Indikator Kabupaten Layak Anak yang cukup
k menyederhanakan dan mempermudah dalam menjawab
di perlukan teori yang sederhana dan sesuai dengan
kepentingan yang terlibat sehingga bisa menjawab suatu

permasalahan. Peneliti melihat bahwa teori ini mampu mencakup seluruh permasalahan dalam penerapan *Collaborative Gevornance* dengan indikator yang dimiliki.

Pada dasarnya model kerangka kerja *collaborative governance* merupakan metode pegambilan keputusan. Seperti yang dikatakan Ansell dan Gash sebelumnya bahwa *collaborative governance* yaitu teknik perumusan kebijakan publik, di mana prosesnya dilakukan secara konsensus. Salanjutnya Ansell dan Gash juga menerangkan aktor yang terlibat dalam proses *collaborative governance* seperti pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga non pemerintah, dan para intelektual kampus (Ansell & Gash, 2008). Maka dari itu, penulis melihat bahwa Model *Penta helix* mampu menjadi alternatif kolaborasi dalam mewujudkan kabupaten layak anak dan memenuhi seluruh indikatornya.

Penta helix merupakan perluasan dari strategi *triple-helix* dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga non profit dalam rangka mewujudkan inovasi. *Triple-helix* diperkenalkan pertama kali diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 1995 dengan melibatkan unsur Akademisi, bisnis dan pemerintah. Penggunanya dulu direkomendasikan untuk pengembangan ekonomi. Namun, karena kebutuhan adaptasi dalam pengembangan perusahaan sangat dibutuhkan utamanya dalam melakukan ekspor ke pasar dunia, penerapan model *Quadraple-helix* dengan menambahkan jaringan Komunitas muncul dan direkomendasikan untuk pengembangan dan kemakmuran sebuah perusahaan (Tonkovic dkk, 2015).

Selanjutnya model *Penta helix* muncul untuk lebih menciptakan sebuah kebiijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berkolaborasi dan bersinergis, model *Penta helix* pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata Arif Yahya Tahun 2016 dalam Maturbongs dan Lekatompessy (2020). Teori ini sudah menjadi rujukan dibeberapa penelitian, terakhir model *Penta helix* digunakan dalam penelitian yang berjudul “Kolaborasi Mode *Penta helix* Dalam Mewujudkan Smart Village Pondok Ranji (Kelvin, Widianingsih dan Buchari 2022).

Berdasarkan beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa *Collaborative Penta helix* adalah kerjasama, interaksi, kompromi oleh beberapa pihak yang terkait baik itu antar aktor, antar organisasi atau antar institusi maupun lembaga kelompok yang juga menerima manfaat dari adanya stategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Seluruh aktor terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan tidak harus merujuk kepada aktor-aktor publik, forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama, forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata lain forum ini

sensus, kolaborasi yang berfokus pada kebijakan publik
ublik.

ollaborative governance juga dikenal sebuah startegi
atkan 5 (lima) elemen didalamnya antara lain ; Akademisi,
komunitas dan media untuk menciptakan ekosistem
dan pengetahuan dari tiap sektor demi mencapai tujuan
kebijakan. Model Penta helix merupakan referensi dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengembangan sinergitas antara instansi untuk mencapai tujuan (Soemayani, 2016). Kolaborasi dengan model pentahelix telah memainkan peran penting dalam mendukung dan mewujudkan tujuan inovasi bersama, pentahelix juga berkontribusi pada kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi di suatu daerah (Fitriyyah, 2022)

Model *Penta helix* sangat berguna untuk menyelesaikan masalah multi pihak dimana pemangku kepentingan mewakili berbagai kepentingan. Kolaborasi dari 5 (lima) pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mewujudkan sebuah kebijakan yang didukung oleh beragamnya sumber daya yang saling berinteraksi secara sinergis. *Penta helix* yakni sebagai berikut:

Gambar I.2 Aktor Model *Penta helix*

Sumber : Website Depoknetwork 2021

Berikut peran masing-masing unsur dalam model *Penta helix* (Yahya, 2016):

1. Pemerintah

   Pemerintah pada model *Penta helix* berperan sebagai regulator. Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan objek dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone.

   Dalam hal ini melibatkan semua jenis kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Kebijakan, dan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik dan swasta. Pemerintah juga berperan dalam
   n para pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam
   olaborasi.

   da model *Penta helix* berperan sebagai unit operasional
   n Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone. Bisnis/Swasta
   s yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis/Swasta berperan sebagai promotor atau penyumbang anggaran dalam menyediakan nilai tambah atau pendapatan dalam bentuk pendanaan untuk pengembangan sektor dan mendorong pengembangan kabupaten layak anak di kabupaten Bone.

3. Akademisi
   Akademisi pada model *Penta helix* berperan sebagai konseptor dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Seperti melakukan standarisasi proses pada kegiatan yang akan dilakukan serta sertifikasi dan keterampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan penggunaan konsep, teori-teori terbaru yang relavan dengan kegiatan atau sektor yang dikembangkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
4. Komunitas
   Komunitas pada model *Penta helix* dalam mewujudkan kabupaten layak anak berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relavan dengan *concern* yang dikembangkan. Komunitas juga dapat berperan sebagai perantara atau menjadi penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu proses dalam mewujudkan kabupaten layak anak. Komunitas yang dimaksud dalam hal ini adalah komunitas resmi ataupun masyarakat yang memiliki peran penting dalam perkembangan kerjasama tersebut.
5. Media
   Media pada model *Penta helix* berperan sebagai expender, dalam hal ini media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image* terkait perwujudkan kabupaten layak anak di kabupaten Bone. Di era sekarang ini pengembangan program melalui publikasi oleh media merupakan unsur yang sangat esensial agar masyarakat dapat mengetahui informasi, peran dan fungsi dari masing-masing elemen yang terlibat dalam mewujudkan kabupaten layak anak di kabupaten Bone.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa model Penta helix adalah model inovasi yang relavan untuk digunakan dalam rangka mewujudkan kabupaten layak anak di daerah karena keterlibatan 5 (lima) elemen didalamnya yaitu pemerintah, bisnis/swasta, akademisi, komunitas dan media memiliki peran dan pengaruh yang begitu besar sehingga apabila elemen tersebut berkolaborasi tentunya akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal.

I.2.6 Kabupaten Layak Anak

raturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 abupaten/Kota Layak Anak Pasal 1 menjelaskan bahwa ak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah an sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Maka dari itu, program Kabupaten/Kota Layak Anak memiliki dua tujuan baik secara umum maupun khusus. Jika dilihat secara umum, KLA bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak sedangkan tujuan secara khusus, KLA diciptakan untuk membangun inisiatif di kalangan pemerintah di tigkat Kabupaten/Kota yang mengacu pada upaya implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) mulai dari kerangka hukum lalu menjadi sebuah definisi, lalu menjadi strategi dan mendorong adanya pembangunan baik itu di tuangkan kedalam sebuah program, kebijakan ataupun kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak serta perlindungan anak di wilayah Kabupaten/Kota (Rosalind kk., 2014).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 mengatakan bahwa apabila seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. seseorang tersebut tergolong sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan serta hak yang anak semestinya dapatkan. Maka dari itu, Penerapan Kabupaten Layak Anak merupakan hal yang begitu esensial karena anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dalam bernegara, serta 10,91% dari total penduduk Indonesia adalah mereka yang berusia anak atau sekitar 30,2 juta jiwa (BPS, 2023).

I.2.7 Indikator Kabupaten Layak Anak

Untuk mewujudkan KLA terdapat beberapa variabel-variabel yang telah ditentukan guna membantu dalam melakukan pengukuran serta memberikan penilaian dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. indikator tersebut tentunya akan menjadi acuan bagi pemerintah di tingkat Kabupaten dalam membuat sebuah perencanaan, pemantauan, pelaksanaan serta evaluasi dalam hal pengimplementasian program dan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. menyebutkan bahwa untuk mewujudkan KLA tiap daerah dapat mengukurnya melalui 24 Indikator yang dikelompokkan ke dalam 1 Kelembagaan dan 5 Kluster Sebagaimana berikut ini :

1. Kelembagaan, terdiri dari beberapa indikator seperti:
   1) Peraturan Daerah Tentang KLA
   2) Penguatan kelembagaan KLA
   3) Adanya peran dari masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam memberikan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak (PHPA).
2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari:
   1) Anak yang memiliki akte kelahiran

ya fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
nya wadah penampung partisipasi anak
ıgan Keluarga dan Pengasuhan Altertnatif
ogram pencegahan perkawinan anak
ı terhadap Lembaga kosultasi penyedia layanan
an anak bagi orang tua atau keluarga
mbaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5) Terdapat infrastruktur ramah anak di ruang publik

4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahtraan
   1) Terdapat persalianan pada fasilitas Kesehatan
   2) Status gizi pada balita
   3) Pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA)
   4) Fasilitas Kesehatan dengan standarisasi pelayanan ramah anak
   5) Lingkungan sekitar yang sehat
   6) Tersedianya kawasan Bebas asap rokok
5. Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
   1) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD- HI)
   2) Wajib Belajar 12 Tahun
   3) Adanya Sekolah Ramah Anak
   4) Tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan budaya, kreatifitas dan rekreasi yang ramah terhadap anak
6. Klaster Perlindungan Khusus
   1) Adanya pelayanan bagi korban kekerasan dan eksploitasi pada anak
   2) Adanya pelayanan bagi korban yang terjerat kasus pornografi, narkotika dan terinfeksi HIV-AIDS
   3) Adanya pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)
   4) Adanya peselesaian bagi anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), korban jaringan teroris dan stigmasi masyarakat akibat kondisi orang tuanya.

Berdasarkan indikator di atas peneliti berfokus untuk meneliti pada tahapan kelembagaan yaitu pada indikator ke dua bagian penguatan kelembagaan KLA. Pada indikator penguatan kelembagaan KLA terdapat sebuah komponen yang harus terpenuhi yakni Gugus Tugas KLA yang banyak melibatkan aktor dalam *collaborative governance.* Maka dari itu penulis akan mengidentifikasi bentuk kolaborasi yang telah dilakukan oleh berbagai sektor dalam gugus tugas KLA dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak pasal 1 menjelaskan bahwa Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota. Anggota gugus tugas berasal dari perwakilan perangkat daerah, forum anak, ha dan media massa.

terdiri atas penanggung jawab kelembagaan, klaster hak sipil er lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster esejahteraan, klaster pendidikan pemanfaatan waktu luang erta klaster perlindungan khusus. Keberfungsian gugus tugas ci keberhasilan peyelenggaraan KLA di daerah.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Melalui tugas dan fungsinya yang senantiasa mengkoordinasikan pelaksanaan KLA di setiap daerah, melakukan pertemuan atau rapat koordinasi rutin antar anggota gugus tugas, melakukan penentuan fokus utama yang disesuaikan dengan permasalahan utama yang terjadi di setiap daerah, bersedia menyiapkan regulasi-regualasi pendukung dan yang terakhir ialah salalu melakukan pemantauan, pelaporan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala dengan selalu melibatkan kelompok anak (Kementerian PPPA, 2022).

I.2.8 Kerangka Berpikir

Gambar I.3 Kerangka Berpikir

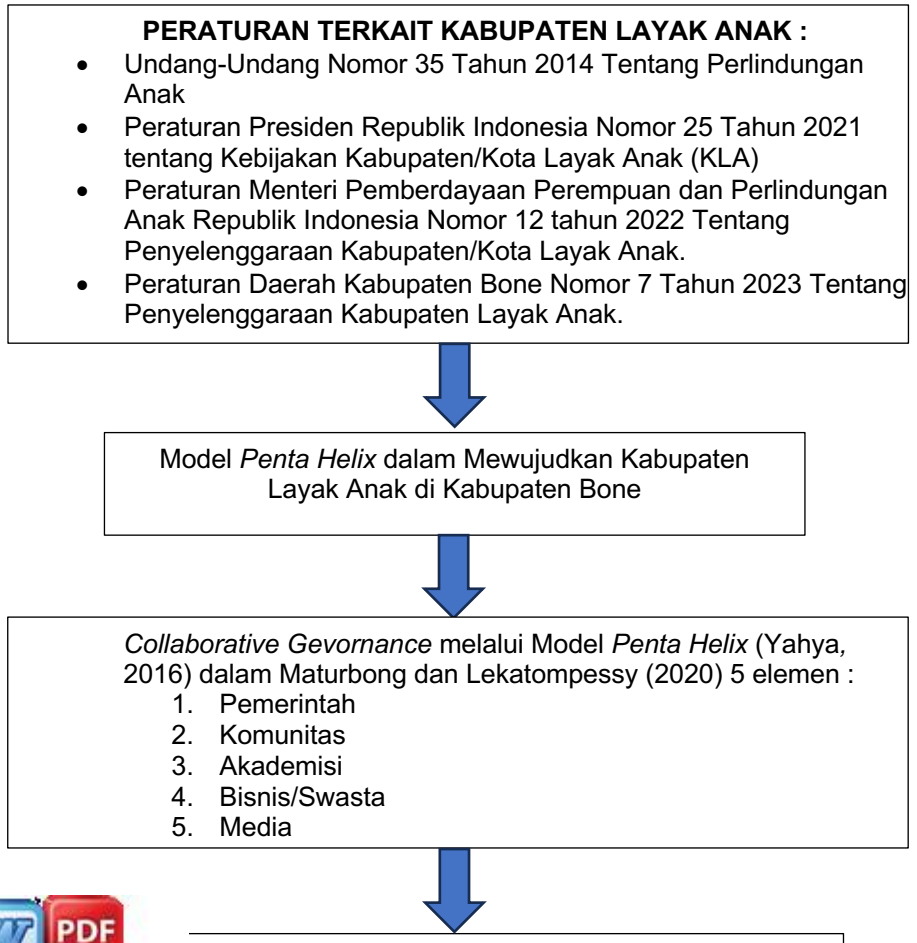

Sumber : (Olahan Peneliti, 2024)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses *Collaborative Gevornance* melalui Model *Penta helix* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone.

I.3.2 Manfaat

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Secara Teoritis
   Secara teoritis hasil riset ini akan menunjukkan variasi empiris yang dapat memperkuat penerapan model *Penta helix* khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA).
b) Secara Praktis
   1) Memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dari hasil riset ini berupa rekomendasi dari hasil riset yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan kabupaten layak anak kedepannya.
   2) Dapat menjadi media informasi bagi masyarakat untuk mengetahui penerapan *collaborative gevornance* melalui model *Penta helix* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2013:1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian Prastowo (2016:24) mempertegas bahwa penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, melalui metode- metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena metode ini lebih sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan peneliti bertujuan untuk mengetahui, memahami serta memperdalam situasi Implementasi Kolaborasi Model *Penta helix* Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone. Selanjutnya, Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa. Pada dasarnya, deskriptif kualitatif melibatkan proses konseptual dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi.

II.2 Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan desain penelitian studi kasus, dalam studi kasus yang dimaksud terkait penerapan Model *Penta helix* Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone. studi kasus adalah sebuah strategi dalam kualitatif dimana peneliti mengkaji program, kejadian, aktivitas, proses atau salah satu individu dengan lebih mendalam.

Dalam penelitian kualitatif pendekatan studi kasus lebih disukai. Melalui studi kasus metode kualitatif akan memperoleh informasi yang lebih mendalam. Oleh karena itu penelitian studi kasus membutuhkan waktu yang lama dalam proses penelitiannya.

II.3 Prosedur

II. 3.1 Penentuan Informan

Menurut Sugiono (Hardani dkk., 2020) Penentuan informan harus menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan

l para riset kualitatif disebut informan atau subjek riset, yaitu
uk diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan riset.
enelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau
g bersifat unik dan kompleks. Oleh krena itu, prosedur
ta atau penentuan informan adalah hal yang penting dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terkait bagaiaman menentukan informan kunci ialah dengan melihat situasi sosial tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian (Hardani., dkk 2020)

Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampling yang digunakan merupakan teknis *purposive sampling.* Menurut Sugiyono (2020) teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel sumber data yang menggunakan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu pada penelitian ini merupakan aktor yang mengetahui tentang aktor lain yang terlibat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone.

Tabel I.4 Daftar Informan Penelitian

No.	Instansi	Instansi/Komunitas
1.	Pemerintah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone
2.	Bisnis/Swasta	-
3.	Akademisi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
4.	Komunitas	Forum Anak Kabupaten Bone
5.	Media	Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Bone

Sumber ; (Olahan Peneliti, 2024)

II. 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mungumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

   Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau obyek sasaran. Peneliti melakukan pengamatan langsung sesuai dengan fakta dan fenomena yang ada (Hardani dkk., 2020). Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait bentuk kerjasama yang sudah dilakukan serta kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak dari sudut pandang *collaborative gevornance* melalui Model *Penta helix.*

2. Wawancara

   Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada respondeen, wawancara dibagi menjadi dua yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. rstruktur sering juga disebut dengan wawancara mendalam, if, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka. Sedangkan uktur sering juga disebut sebagai wawancara baku yang annya sudah ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan a sudah disediakan (Hardani dkk., 2020).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Peneliti melakukan wawancara dengan gugus tugas KLA Kabupaten Bone dengan membaginya ke dalam 2 kategori informan yaitu Pemerintah dan Masyarakat. Melalui media wawancara peneliti mengharapkan dapat mengetahui hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh tim gugus tugas KLA Kabupaten Bone secara mendalam selama proses *collaborative governance* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kabupaten Bone ini berjalan sehingga peneliti dapat mengidentifikasi keterlibatan dan peran seluruh aktor sesuai dengan model *Penta helix.*

3. Dokumentasi

   Dokumentasi adalah bagian dari data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku, internet, majalah, surat kabar dan dokumen-dokumen yang relevan. Pada tahapan dokumentasi dianggap penting karena tahapan ini dapat dijadikan sebagai bukti penguat dari temuan-temuan ataupun gagasan yang telah dikembangkan memecahkan permasalahan dalam penelitian (Hardani dkk.,2020).

   Selanjutnya dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah foto-foto kegiatan serta dokumen pendukung lainnya seperti hasil peringkat atau skor penilaian KLA, laporan terkait kasus kekerasan anak, anak putus sekolah serta lain sebagainya.

II. 3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data melalui catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis selannjutnya kemudian ditafsirkan. Prosedur analisis data akan dilakukan terhadap masalah yang muncul dan difokuskan pada upaya menggali fakta yang mendalam. Maka dari itu untuk memberikan gambaran data hasil penelitian dilakukakan prosedur penelitian menurut (Miles & Hubermen, 1994) sebagai berikut :

a. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan. Begitupun reduksi data dalam penelitian ini merupakan hasil dari melintas, mengambil kesimpulan sesuai dengan informasi atau data yang telah didapatkan oleh peneliti pada penelitian yang berkaitan. Melalui penelitian ini dilakukan proses peringkasan data yang telah ditetapkan baik melalui data primer maupun data sekunder.
b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dengan cara membuat uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Tujuan
   erupakan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi,
   rja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami
   an atau verifikasi, merupakan usaha untuk mencari atau
   a, keteraturan, pola-pola, penjelasan dari alur sebab akibat.
   tahapan menelaah dari hasil data-data yang telah dibuktikan
   neliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang berguna
   an hasil penelitian secara keseluruhan mengenai proses

Optimized using
trial version
www.balesio.com

collaborative gevornance melalui model *Penta helix* dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bone.

II. 3.4 Validitas dan Reliabilitas Data

Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber ialah sebuah teknik pengujian data dan informasi melalui cara melihat data yang sama dengan informan satu dan lainnya maupun sumber lainnya dilihat dari jurnal serta berita di media data yang didapatkan dari informan dikompilasikan dengan hasil yang telah ditemukan seperti hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi.

Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi selama proses penelitian. Data yang sama atau sejenis lebih mantap kebenarannya apabila dapat digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Triangulasi sendiri bukanlah semata mata mencari kebenaran dari beberapa fenomena melainkan lebih kepada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Hardani dkk., 2020).

Optimized using
trial version
www.balesio.com